



Jangan Bergantung ke Dana Pusat

Legislatif Desak Inovasi Pemkot Yogya untuk Genjot PAD

YOGYA. TRIBUN - Kalangan legislatif mendesak Pemkot Yogyakarta melakukan rangkaian inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bukan tanpa alasan, efisiensi anggaran yang diperkirakan masih terjadi hingga 2026, membuat pemerintah daerah tidak bisa menggantungkan diri kepada dana transfer pusat.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Wisnu Sabdonu Pitro, menyampaikan, fenomena tersebut sontak menuntut kemandirian daerah dalam upaya pembangunan. Ia pun menyoroti postur anggaran perubahan yang disampaikan oleh eksekutif, di mana terjadi penurunan target PAD dari semula Rp1 triliun menjadi Rp936 miliar.

Penurunan paling tinggi terjadi pada sektor retribusi daerah dari Rp80,9 miliar menjadi Rp73,24 miliar, kemudian sektor pajak daerah dari Rp719,7 miliar menjadi Rp 656,9 miliar. Meskipun, di sisi lain, sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sektor lain-lain pendapatan yang sah terjadi peningkatan.

"Harapan kami, tentu PAD ini bisa kembali seperti semula, yakni Rp1 triliun. Kemandirian dalam menggali potensi pendapatan daerah menjadi kunci," tandasnya. Kamis (17/7).

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiyat Nujana,

menambahkan, eksekutif seharusnya mulai melihat potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mengatrol PAD. Dengan begitu, target pembangunan daerah yang dicantumkan Pemkot Yogyakarta bisa berjalan sesuai rencana tanpa terbebani kemungkinan efisiensi.

"Makanya, iklim investasi harus dijaga betul. Semakin banyak investasi yang tumbuh di kota ini, ekonomi daerah bisa semakin stabil. Tapi, yang terjadi, dalam postur APBD perubahan, pajak hotel dan restoran malah turun. Padahal, dua itu menjadi sektor PAD andalan," tegasnya.

Di samping itu, beberapa sektor belanja daerah layaknya untuk upaya pengelolaan sampah, masih bisa ditekan dengan melibatkan peran swasta. Menurutnya, skema tersebut cenderung lebih masuk akal dan menguntungkan dibanding mengeliminir APBD Kota Yogyakarta secara penuh.

"Ada peluang investasi di sana. Lagi pula, Pemkot menyadari juga, untuk meng-cover 100 persen limbah dengan pengadaan tambahan mesin-mesin insinerator itu tidak akan sanggup," cetusnya.

Kendati demikian, ia optimis, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif di era kepemimpinan Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan memberikan secercah harapan. Banyaknya forum yang di-

fasilitasi Wali Kota pun membuka ruang diskusi untuk menyampaikan ragam masukan dan kritik terkait penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kelabakan

Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta, Tryono Hari Kuncoro, menyatakan, eksekutif tidak boleh menggantungkan diri kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Lantaran, ketika efisiensi anggaran kembali ditetapkan pada 2026 nanti, Pemkot Yogyakarta bakal kelabakan menghadapi beragam dinamikanya.

"Di perubahan banyak yang kita soroti adalah tentang pendapatan. Kita tidak bisa selalu mengandalkan transfer pusat, karena efisiensi bisa jadi sampai 2026," cetusnya.

Ia menyebut, salah satu ke-repotan paling utama adalah untuk menutup anggaran belanja pegawai yang cenderung tinggi dan mencakup hal-hal bersifat rutin. Dalam berbagai kesempatan, pihaknya pun menyampaikan, maksimalisasi pendapatan menjadi sesuatu yang penting, agar Pemkot Yogyakarta memiliki skenario untuk meningkatkan PAD.

"Kita beberapa kali minta kajian tentang potensi pendapatan. Misalnya, siapa wajib pajak yang rendet, supaya bisa dikejar. Sehingga, ketika ada guncangan hubungan keuangan pusat-daerah, pengaruhnya tidak terlalu besar," pungkasnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005